

Pemimpin Visioner Solusi Hilangkan Patologi Birokrasi

Sosok pemimpin visioner dinilai menjadi solusi yang seimbang antara mengatasi masih terjadinya patologi atau penyakit dalam tubuh birokrasi dan munculnya semangat meritokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Calon pemimpin yang memiliki visi untuk mewujudkan sistem meritokrasi, salah satunya melewati proses pembentukan di partai politik.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik memiliki sistem pendidikan politik untuk menciptakan kader-kader terbaik yang dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin, yang kemudian pemimpin itu lahir melalui proses elektoral.

"Seluruh pemilih pada saat pemilihan umum harus bisa mendorong dan ikut berpartisipasi memunculkan pemimpin-pemimpin visioner melalui elektoral sehingga patologi birokrasi bisa hilang," kata Taufik usai memberikan kuliah reguler kepada mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Taufik menambahkan, patologi birokrasi kerap terlihat pada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan kekuasaan, dan penempatan seorang tidak berdasarkan pandangan objektif. Bahkan, di era Orde Baru, patologi birokrasi sangat terlihat sekali dalam penempatan pejabat harus berdasarkan rekomendasi dari kepala negara saat itu.

"Kita tidak bisa membiarkan patologi birokrasi melebar karena bisa terjadi ketidakpercayaan masyarakat. Namun juga harus menyiapkan rakyat secara bertahap memahami arti penting meritokrasi karena kalau tidak terkoneksi, akhirnya bisa kembali kepada sikap patologi," kata Taufik.

Sehingga, di era reformasi ini, muncul harapan agar sistem meritokrasi bisa diterapkan, yaitu penempatan seorang birokrat di pemerintahan berdasarkan pandangan objektif, berbasis kinerja, dan menerapkan asas profesionalisme. Penerapan meritokrasi dinilai sebagai bentuk ideal dalam sistem aparatur sipil negara, namun harus dilihat secara empiris kondisi masyarakat, sehingga penerapannya harus secara perlahan-lahan.

Di sisi lain, Taufik melihat di era reformasi ini, pemimpin visioner memang ditentukan oleh rakyat memilih saat pemilu. Namun tetap saja ada beberapa hal yang mempengaruhi elektoral seperti partai politik, politik uang, lembaga survei yang mengorbitkan nama calon, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung ja-

wab dalam sistem demokrasi.

Ironisnya, tambah politisi Partai Amanat Nasional itu, politik uang masih terjadi karena beberapa faktor misalnya terkait mentalitas masyarakat dan kondisi kemiskinan yang gampang terpengaruh dengan godaan penyakit demokrasi.

"Meskipun Indonesia melaksanakan proses reformasi, namun ada sekelompok orang tidak bertanggung jawab tidak menyadari esensinya sehingga menjual kemiskinan dan memberikan janji-janji

politik. Namun belum dalam bentuk paparan visi dan misi agar masyarakat bisa sadar dalam memilih," tambahnya.

Menutup sesi perkuliahan, Taufik kembali mengajak kalangan muda untuk bisa menghilangkan patologi atau penyakit birokrasi seperti KKN, serta penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, para pemuda merupakan generasi harapan bangsa, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan untuk ambil bagian sebagai calon pemimpin masa mendatang.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat memberikan kuliah reguler di Program Magister Administrasi Publik Undip



Foto bersama Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dengan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Undip